



LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA
TAHUN ANGGARAN 2005

IDENTIFIKASI SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN REGIONAL DI INDONESIA

Oleh:

Deni Kusumawardani, SE., M.Si.

Achmad Sjafi'i, SE.

Rudi Purwono, S.E.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat

Nomor : 036/SPPP/PP-PM/DP3M/IV/2005

Nomor Urut : 20

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

November, 2005

- REGIONAL IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- ECONOMIC DEVELOPMENT



LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA
TAHUN ANGGARAN 2005

IDENTIFIKASI SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN REGIONAL DI INDONESIA

KKB
KK.2
LP 08/08
Kus
i

Oleh:

Deni Kusumawardani, SE., M.Si.
Achmad Sjafi'i, SE.
Rudi Purwono, S.E.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor : 036/SPPP/PP-PM/DP3M/IV/2005
Nomor Urut : 20

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

November, 2005

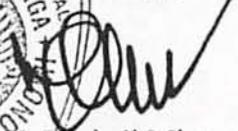


**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA**

1. a. Judul Penelitian	:	IDENTIFIKASI SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN REGIONAL DI INDONESIA
b. Macam Penelitian	:	() Fundamental () Terapan (√) Pengembangan
c. Kategori Penelitian	:	III (Menunjang Pembangunan)
2. Ketua Peneliti		
a. Nama Lengkap	:	Deni Kusumawardani, SE, MSi
b. Jenis Kelamin	:	Laki-laki
c. Pangkat/ Golongan & NIP	:	Asisten Ahli/ IIIb/ 132230606
d. Jabatan Sekarang	:	--
e. Fakultas / Jurusan/ Puslit	:	Ekonomi/ IESP
f. Univ./Inst./Akademi	:	Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang diteliti	:	Ekonomi Pembangunan
3. Jumlah Anggota Peneliti	:	3(tiga) orang
4. Lokasi Penelitian	:	Indonesia
5. Kerjasama dengan Instansi Lain		
a. Nama Instansi	:	-
b. Alamat	:	-
c. Telp/Fax/ E-mail	:	-
7. Jangka Waktu Penelitian	:	4(empat) bulan
8. Biaya yang diperlukan	:	Rp 5.500.000,00
	:	(Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Surabaya, 26 Desember 2005
Ketua Peneliti,

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Airlangga



Das Be. H. Karjadi Mintaroem, MS
NIP. 130 517 150



Deni Kusumawardani, SE, MSi.
NIP. 132 230 606

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNAIR




Prof. Dr. H. Sarmanu, MS.
NIP. 130 701 125

Ringkasan

Identifikasi Sektor-Sektor Unggulan Regional Di Indonesia

Sumberdaya merupakan semua potensi yang dimiliki oleh alam dan manusia, baik dalam bentuk tanah, bahan mentah, modal, tenaga kerja, keahlian, keindahan alam maupun sosial budaya. Potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Untuk itu perlu identifikasi sektor-sektor unggulan regional yang dalam hal ini dilakukan berdasarkan analisis struktur ekonomi, analisis pertumbuhan ekonomi, analisis *shift-share*, analisis *location quotient*, *economic base model (multiplier)*. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder untuk PDRB 30 Provinsi dan PDB Indonesia dari tahun 1995 sampai tahun 2000 berdasarkan tahun konstan 1993.

Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera masih mengandalkan kegiatan sektor primer dalam pembentukan PDRB. Hampir semua Provinsi untuk sektor pertanian merupakan sektor basis dan memiliki Sd dan Sp positif, kecuali Provinsi Jambi, Kep. Bangka Belitung dan Bengkulu. Dari sisi multiplier terlihat bahwa semua Provinsi mempunyai nilai rata-rata antara 1 dan 2, kecuali Provinsi Sumatra Barat dan Lampung memiliki multiplier di atas 2. Kondisi ini menjelaskan bahwa sektor basis provinsi-provinsi di Pulau Sumatera masih kecil memberikan *spread effect* dalam perekonomian. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali sudah terjadi *proses transformasi ekonomi* dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier.

Pada tahun 1998 – 2000 (saat krisis) hanya sektor listrik, gas dan air minum yang tetap mengalami pertumbuhan positif, sedangkan beberapa sektor lain adalah negatif, bahkan untuk sektor bangunan dan sektor bank & lembaga keuangan mengalami pertumbuhan negatif yang cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada saat krisis ternyata sektor bangunan dan sektor bank & lembaga keuangan merupakan sektor yang langsung terpukul.

Berdasarkan kontribusi sektoral ternyata dua sektor yang memiliki kontribusi tertinggi pembentukan PDRB provinsi di Pulau Kalimantan adalah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Khusus Provinsi Kalimantan

Timur ternyata sektor pertambangan & penggalan, dan sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar. Dalam analisis gabungan LQ dan Shift Share dengan perbandingan nasional ternyata hampir semua Provinsi di Kalimantan tidak memiliki sektor basis, kecuali Kalimantan Timur.

Berdasarkan kontribusi sektoral ternyata sektor yang memiliki kontribusi tertinggi pembentukan PDRB provinsi di Pulau Sulawesi adalah sektor pertanian dan sektor pengangkutan & komunikasi. Peranan yang cukup tinggi sektor pertanian di Sulawesi, khususnya cengkeh di Sulawesi Utara hendaknya dapat dipergunakan sebagai perencanaan pembangunan daerah berbasis komoditas unggulan. Sementara itu, ada dua sektor yang memiliki kontribusi tertinggi pembentukan PDRB Provinsi di Maluku, Papua dan Nusa Tenggara yaitu sektor pertanian, dan sektor perdagangan, hotel, & restoran. Papua memiliki sumberdaya alam yang melimpah tetapi kualitas sumberdaya manusia terbatas, sehingga strategi yang diupayakan adalah pembangunan daerah berbasis input.

Kata kunci = analisis struktur ekonomi ; analisis pertumbuhan ekonomi

Summary

Identification of the Regional Supreme Sectors in Indonesia

The natural and human resources can be in form of soil, crude substances, capital, labors, skills, the beauty of nature and cultural social. The potentialities should be able to bring the related regional societies to prosperity. Therefore, there should be identification of the regional supreme sectors. In this case, the identification is done based on economic structure analysis, economic growth analysis, shift-share analysis, location quotient analysis, and economic base model (multiplier). The data used in this research is secondary data for Gross Regional Domestic Product (GRDP) of 30 provinces and Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) of year 1995 to 2000 based on constant year of 1993.

Provinces in Sumatra still rely on primary sector in GRDP accumulation. Almost all agricultural provinces are basic sectors and have positive S_d and S_p , except for Province of Jambi, Bangka Belitung Islands, and Bengkulu. From multiplier side, it shows that all provinces have average value between one and

two, except for Province of West Sumatra and Lampung, which have multiplier value above two. This implies that basic sectors of provinces in Sumatra remain giving little spread effect in economy. Provinces in Java and Bali have gone through economic transformation process from primary sectors into secondary/tertiary sectors.

In year 1998-2000 (economic crisis phase), only sectors of electric, gas, and drinking water remained steady in increasing, while other sectors got negative impact even construction sector, bank, and financial organizations happened to have had great collision. It indicates that in crisis phase, it turned out that construction sector, bank, and financial organizations got direct shock.

According to sector contribution point of view, two sectors have the highest contribution to GRDP of provinces in Kalimantan. They are agriculture and manufacture sectors. In West Kalimantan alone, mining and manufacture sectors give the greatest contribution. In combined analysis of LQ and Shift Share with national comparison, almost no provinces in Kalimantan have basic sectors except East Kalimantan.

According to sector contribution point of view, the highest contribution to GRDP in provinces of Sulawesi comes from agriculture, transportation, and communication. The great contribution from agricultures, especially of clove in North Sulawesi, should be able to be used as development planning of area with best commodity. While, two sectors have the highest contribution to GRDP of provinces in Moluccas, Papua and the Lesser Sundas. They are agriculture and commerce, hotel and restaurant. Papua's natural resources are excellent yet the human resources are not. Hence, the strategy applied is based-one-input area development.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya laporan penelitian yang berjudul “Identifikasi Sektor-Sektor Unggulan Regional Di Indonesia” dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sarmanu, selaku ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian ini;
2. Dekan, Pembantu Dekan I, dan Ketua Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Unair yang telah memberikan dorongan untuk melakukan penelitian;
3. Semua Pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu atas semua bantuannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena kritik dan saran untuk penyempurnaan penelitian ini sangat diharapkan.

Surabaya, Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN 1
	1.1. Latar Belakang 1
	1.2. Perumusan Masalah 3
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA 4
	2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi..... 4
	2.1.1. Akumulasi Kapital, Pengembangan Teknologi dan Model Harrod Domar 5
	2.1.2. Kaitan antara Rival Input, Accumulation dan Pertumbuhan Ekonomi..... 6
	2.1.3. Model Pertumbuhan Neo-Klasik..... 7
	2.1.4. Model Pertumbuhan AK-Endogen..... 8
	2.1.5. Model Pertumbuhan R & D – Endogen..... 8
	2.1.6. Akumulasi Kapital Pada Sektor R & D..... 9
	2.2. Transformasi Struktural..... 9
	2.3. Konsep Perencanaan Pembangunan..... 10
	2.3.1. Konsep Wilayah..... 10
	2.3.2. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah..... 11
	2.3.3. Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Sumberdaya..... 12
	2.3.4. Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Komoditas Unggulan..... 14
	2.3.5. Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Efisiensi..... 16
	2.3.6. Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peranan Pelaku Pembangunan..... 17
	2.4. Analisis Struktur Ekonomi..... 19
	2.5. Analisis Pertumbuhan Ekonomi..... 20
	2.6. Analisis Shift Share..... 20
	2.7. Analisis Location Quotient..... 21
	2.8. Economic Base Model (Analisis Multiplier)..... 22
BAB III	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 24
	3.1. Tujuan Penelitian 24
	3.2. Manfaat Penelitian 24
BAB IV	METODE PENELITIAN 25
	4.1. Model Analisis..... 25
	4.1.1. Analisis Struktur Ekonomi 25
	4.1.2. Analisis Pertumbuhan Ekonomi 26
	4.1.3. Analisis Location Quotient 26
	4.1.4. Analisis Shift Share 27
	4.1.5. Economic Base Model (Analisis Multiplier)..... 28
	4.2. Identifikasi Variabel..... 29
	4.3. Definisi Operasional..... 30

4.4. Jenis dan Sumber Data.....	30
4.5. Teknik Pengumpulan Data.....	31
4.6. Teknik Analisis.....	31
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	32
5.1. Sumatera	32
5.2. Jawa dan Bali	35
5.3. Kalimantan	38
5.4. Sulawesi	40
5.5. Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara	41
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	43
6.1. Kesimpulan	43
6.2. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	

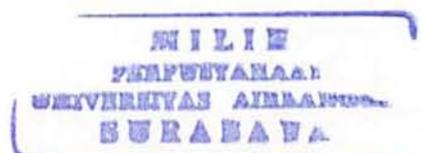
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan landasan desentralisasi di bidang politik, administrasi, dan fiskal dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah. UU No.22/1999 berintikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah (*power sharing*). Sementara UU No.25/1999 mengatur pembagian sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (*financial sharing*) sebagai konsekuensi pembagian kewenangan tersebut.

Salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan untuk memperoleh hak otonomi daerah adalah dana/keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan salah satu faktor esensial dalam mengukur kemampuan daerah melaksanakan otonomi. Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dimana daerah harus dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, berimplikasi pada kewajiban daerah untuk menggali segala sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, mengingat tidak semua penerimaan dari sumber keuangan daerah dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, maka perlu bantuan pembiayaan yang cukup seperti bantuan pemerintah pusat.



Pelaksanaan otonomi daerah secara menyeluruh yang sedang ditetapkan memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada daerah untuk merencanakan dan mengatur pola pengembangan daerahnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk mampu merencanakan pengembangan daerahnya dengan baik.

Perencanaan pembangunan suatu daerah harus sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah tersebut. Untuk itu diperlukan suatu landasan yang dapat menjadi bahan perencanaan pembangunan itu sendiri, yaitu dengan menganalisis profil daerah melalui model-model ilmiah. Perencanaan yang baik yang dilakukan oleh suatu daerah haruslah didasarkan pada kondisi, potensi, masalah dan peluang, yang terdapat di daerah tersebut.

Salah satu upaya untuk melihat profil ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah adalah dengan memperhatikan perkembangan sektor-sektor ekonomi daerah dari tahun ke tahun dengan menggunakan model-model analisis ekonomi sehingga dapat diketahui dan diidentifikasi kondisi dan potensi serta peluang-peluang yang dapat menjadi pertimbangan bagi pembuatan rencana pembangunan daerah. Untuk itu perlu diidentifikasi sektor-sektor unggulan daerah yang dilakukan berdasarkan basis ekonomi. Identifikasi sektor-sektor unggulan akan lebih memberikan dasar yang baik bagi penyusunan perencanaan daerah sehingga alokasi sumber daya yang digunakan nanti menjadi efektif dan efisien. Disamping itu, dengan menentukan prioritas pengembangan sektor-sektor unggulan yang tepat berdasarkan keunggulan komparatif daerah, diharapkan dapat meningkatkan arus investasi yang lebih besar dan distribusi pendapatan yang lebih merata serta peningkatan perekonomian daerah dan secara tidak langsung peningkatan PAD bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kondisi perekonomian regional di Indonesia**
- 2. Bagaimana mengidentifikasi sektor-sektor unggulan regional di Indonesia yang diharapkan akan memberi peluang bagi percepatan pertumbuhan perekonomian daerah**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi nasional menjadi salah satu tujuan utama pembangunan di negara-negara berkembang. Pembangunan yang diartikan sebagai terjadinya pertumbuhan ekonomi dan perubahan sesuatu telah mendorong negara-negara berkembang untuk terus mengejar ketertinggalannya dari negara maju. Indikator terjadinya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan nasional secara riil (*GNP/GDP at constant price*). Berdasarkan pelaku ekonomi nasional yang terdiri dari sektor rumah tangga (*households*), swasta (*private*) dan pemerintah (*government*) maka secara langsung pendapatan rumah tangga akan mempengaruhi konsumsi dan tabungan, pendapatan bagi perusahaan akan mempengaruhi investasi, sedangkan pendapatan bagi pemerintah akan mempengaruhi konsumsi (*CGOV*) dan investasi (*IGOV*) pemerintah.

Secara matematis, hubungan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut

$$Y_{(t)} = C_{(t)} + S_{(t)} \quad (\text{Income})$$

$$Y_{(t)} = C_{(t)} + I_{(t)} \quad (\text{Output})$$

$$S_{(t)} = I_{(t)} \dots\dots\dots (1)$$

Persamaan sederhana tersebut menunjukkan salah satu keseimbangan penting di pasar barang.

2.1.1 Akumulasi Kapital, Pengembangan Teknologi Dan Model Harrod-Domar

Secara umum investasi merupakan tambahan/perubahan kapital yang terjadi dari tahun t ke tahun $t+1$.

$$I_{(t)} = K_{(t+1)} - (1-\delta) K_{(t)} \dots\dots\dots (2)$$

di mana $I_{(t)} = S_{(t)} = \zeta Y_{(t)}$ dan $\zeta = S/Y$, serta $\theta = K/Y$ (*Capital Output Ratio*), sehingga :

$$K_{(t)} = \theta Y_{(t)} \dots\dots\dots (3)$$

yang pada akhirnya didapat *Harrod Domar Equation* :

$$S/\theta = g + \delta \dots\dots\dots (4)$$

Berdasarkan persamaan Harrod-Domar tersebut, maka kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan output nasional (terjadi pertumbuhan ekonomi) adalah dengan meningkatkan tabungan dan atau meningkatkan efisiensi penggunaan kapital. Di sini jelas terlihat bahwa investasi memegang peranan penting bagi terjadinya pertumbuhan output.

Ada dua macam model pertumbuhan endogen, yaitu Model AK dan Model R & D. Model pertumbuhan AK yang dikembangkan oleh Romer, Lucas dan Rebelo menekankan pada masalah akumulasi kapital, dengan asumsi *constant returns* sebagai prasyarat umum bagi kapital untuk mendorong pertumbuhan secara endogen. Sedangkan Model R & D dikemukakan pula oleh Romer bersama Grossman dan Helpman serta Aghion dan Howitt yang menekankan pada kemajuan teknologi, hasil penemuan baru melalui penelitian yang dilakukan individu-individu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan, meningkatkan produksi serta mendorong pertumbuhan.

Sebuah model pertumbuhan yang merupakan kombinasi antara akumulasi kapital dan inovasi dengan elemen kunci model pertumbuhan neoklasik, disebut dengan *Harrod-Neutral Technology Change*, untuk menciptakan pertumbuhan. Antara akumulasi kapital dengan inovasi teknologi merupakan dua hal yang bersifat komplementer. Aghion dan Hewit (1997) mengungkapkan sebuah argumen bahwa paling tidak pada bagian litbang (R&D) yang memerlukan beberapa investasi (kapital) sebagai bagian mereka bekerja, seperti gedung, komputer, peralatan kantor, peralatan laboratorium dan sebagainya. Sebaliknya, adanya akumulasi kapital saja tanpa didukung penelitian dan inovasi teknologi akan menyebabkan terjadinya *diminishing return*.

2.1.2 Kaitan antara *Rival Inputs, Accumulation* dan Pertumbuhan Ekonomi

Ada empat jenis input yang digunakan dalam proses produksi yaitu: (i) *rival* dan *non-accumulable inputs*, (ii) *rival* dan *accumulable inputs*, (iii) *non-rival* dan *accumulable inputs*, (iv) *non-rival* dan *non-accumulable inputs*. Input yang sifatnya *non-rival* dan *non-accumulable* tidak dibahas lebih lanjut karena kurang menarik (misalnya bahan baku).

Input yang bersifat *rival* adalah input yang hanya digunakan oleh satu sektor/bagian dalam produksi dan tidak dapat digunakan secara simultan oleh sektor lainnya. Misalnya tenaga kerja, diberi simbol L , sebagai contoh input yang sifatnya *rival* dan *non-accumulable*. Meskipun seorang tenaga kerja bagian produksi dapat bekerja pada bagian administrasi, namun ia tidak dapat bekerja pada dua bagian tersebut secara bersamaan. Asumsi bahwa jumlah tenaga kerja konstan sehingga disebut *non-accumulable*. Kapital (K) merupakan contoh dari input yang

bersifat *rival* dan *accumulable*. Seperti halnya tenaga kerja, kapital juga tidak dapat digunakan di dua sektor produksi secara bersamaan, dan kapital bersifat *accumulable*. Pengetahuan (N) merupakan contoh dari input yang bersifat *non-rival* dan *accumulable*. Secara prinsip, suatu ilmu pengetahuan dapat diterapkan pada semua sektor produksi secara simultan, dan sifat dari pengetahuan sendiri yang dapat terus bertambah (akumulatif). Perubahan pengetahuan dapat diukur dari perubahan jumlah produksi barang setengah jadi.

Dapat dituliskan persamaan umum untuk fungsi output dan fungsi akumulasi pengetahuan (Rivera, Batiz dan Romer):

$$Y = F(K_y, L_y; N) \dots\dots\dots (5)$$

$$N = F(K_m, L_m; N) \dots\dots\dots (6)$$

Persamaan (5) menunjukkan bahwa produksi (output) dipengaruhi oleh rival inputs, kapital K_y , dan tenaga kerja L_y . Sedangkan N sebagai non-rival input tidak hanya digunakan oleh sektor produksi saja, namun juga digunakan oleh sektor litbang. Persamaan (6) menunjukkan bahwa perubahan pengetahuan tergantung dari perubahan kapital yang digunakan untuk membiayai pengetahuan dan juga tenaga kerja serta pengetahuan sendiri.

2.1.3 Model Pertumbuhan Neo-Klasik

Model pertumbuhan klasik (berdasarkan kesimpulan Burmeister dan Dobell, 1970) menggunakan *Harrod-Neutral Technical Change*, dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, dan *constant returns to scale* pada output akhir, di mana kapital dan tenaga kerja digunakan dalam perekonomian untuk menciptakan pertumbuhan. Berdasarkan notasi persamaan (5) dan (6), maka dapat dituliskan $Y =$

$F(K,NL)$, dimana $F(\lambda K, \lambda NL) = \lambda F(K, NL)$ dan $N = gN$, dengan g konstan, dan tingkat perubahan teknologi menjadi variabel eksogen. Lebih lanjut lagi, tingkat pertumbuhan dari pengetahuan ($N=g$) sebagai kombinasi dari persamaan di atas dengan tingkat pertumbuhan output, $Y = (\gamma^F/1 - \gamma_k^F)g = g$, di mana $\gamma^F + \gamma_k^F = 1$.

2.1.4 Model Pertumbuhan *AK-Endogenous*

Pada model pertumbuhan ini, diasumsikan terjadi *constant returns* dari kapital yang dapat diakumulasikan sebagai salah satu sumber terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dapat dituliskan bahwa $Y = F(K,L)$ di mana $F(K,L) = KF(I,L)$ dan $N = 0$. Di sini ditekankan bahwa kapital menjadi faktor utama terjadinya pertumbuhan dengan asumsi tidak terjadi perubahan pengetahuan (konstan). Pertumbuhan menjadi tergantung pada besarnya perbedaan kepentingan dan keuntungan yang diperoleh antara sektor tabungan dan sektor investasi, sehingga yang menjadi penentu terjadinya keseimbangan $I = S$ adalah tingkat bunga sebagai cerminan pasar

2.1.5 Model Pertumbuhan *R&D-Endogenous*

Model pertumbuhan ini mengasumsikan bahwa pengetahuan (*knowledge*) bersifat *constant returns*, artinya bahwa penambahan 1 satuan input pengetahuan akan meningkatkan output sebesar satu satuan juga. Usaha manusia yang bekerja dengan memanfaatkan input pengetahuan menjadi penentu terjadinya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan persamaan (5) dan (6) dapat ditulis dengan $Y = F(L_y; N)$ dan $N = R(L_n; N)$ di mana $R(L_n; N) = NR(L_n; 1)$. Pertumbuhan stok pengetahuan bersifat

endogen (ditentukan dari dalam model), $N = R(Ln;1)$. Tingkat pertumbuhan output tercermin dari fungsi produksi, $Y = \gamma_n^F R(Ln;1)$.

2.1.6 Akumulasi Kapital Pada Sektor *R & D*

Jika kapital, tenaga kerja, dan pengetahuan digunakan secara simultan untuk memproduksi output dan memperoleh pengetahuan baru, maka hubungan ini seperti yang sudah diutarakan pada persamaan (5) dan (6). Keterkaitan ketiga variabel tersebut untuk menciptakan pertumbuhan akan mempermudah untuk mengetahui jika terjadi hambatan produksi, sehingga pertumbuhan dapat terus berjalan secara konsisten. Dengan dukungan kapital, penciptaan teknologi baru berjalan lebih baik, sehingga pertumbuhan output meningkat dengan cepat.

2.2 Transformasi Struktural

Analisis pembangunan ekonomi (*economic development analysis*) dapat dilihat sebagai usaha memahami struktur ekonomi dan pertumbuhan di negara-negara berkembang. Menganalisis struktur ekonomi ini dilakukan dengan melihat pembangunan ekonomi sebagai suatu kesatuan proses dalam jangka panjang dari perubahan struktural yang mengiringi pertumbuhan yang terjadi. Hal ini yang disebut sebagai perubahan (transformasi) struktural. Dalam pengertian Syrquin (1988) bahwa transformasi struktural (*structural transformation*) adalah proses yang berhubungan dengan perubahan struktural yang mengikuti pembangunan ekonomi. Sedangkan Chenery (1986) menyebut akumulasi modal fisik dan sumber daya manusia dan pergeseran dalam komposisi struktur permintaan, perdagangan,

kegiatan produksi dan ketenagakerjaan sebagai *the economic core of the transformation*.

Peningkatan pendapatan per kapita akan cenderung menghasilkan perubahan struktur tidak hanya dilihat dari sisi produksi tetapi juga akan terlihat dalam struktur permintaan domestik, perdagangan internasional, ketenagakerjaan, demografi dan distribusi pendapatan. Perubahan struktural yang terjadi dalam sebuah perekonomian dapat dilihat pada fenomena ekonomi seperti transformasi sektor pertanian, industrialisasi, urbanisasi, kenaikan pekerja sektor formal, dan sebagainya.

2.3 Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

2.3.1 Konsepsi Wilayah

Definisi baku mengenai wilayah (*region*) hingga kini belum ada kesepakatan di antara para ahli ekonomi, geografi, sosial, maupun ahli-ahli lainnya yang menekuni bidang ini. Sebagian ahli mendefinisikan wilayah dengan merujuk pada tipe-tipe wilayah, ada pula yang mengacu pada fungsi-fungsi suatu wilayah (kawasan), dan sebagian lainnya berdasarkan korelasi yang kuat di antara unsur-unsur (fisik dan non fisik) pembentuk sebuah wilayah. Namun demikian, secara umum wilayah dapat diartikan sebagai suatu unit geografi yang membentuk suatu kesatuan. Pengertian unit geografi di sini merujuk pada ruang (*spatial*), sehingga pengertian wilayah tidak hanya sebatas aspek fisik tanah, melainkan juga mencakup aspek-aspek lain seperti biologi, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan sebagainya.

Sebagai gambaran umum, wilayah menurut tipe-tipenya dapat dipilah menjadi tiga macam, yakni :

1. Wilayah homogen (*homogeneous region*), yaitu wilayah-wilayah yang mempunyai karakteristik seragam. Keseragaman ciri-ciri tersebut bisa dilihat menurut faktor ekonomi (misalnya beberapa wilayah memiliki struktur produksi yang sama, atau pola konsumsi serupa, dan lain-lain), geografi (serupa dalam hal topografi, iklim, dan lain-lain), sosial budaya (seragam dalam adat istiadat atau perilaku masyarakat), aspek-aspek lainnya.
2. Wilayah heterogen (*nodal region*), yaitu wilayah-wilayah yang saling berhubungan secara fungsional karena adanya faktor heterogenitas (ketidakmerataan). Wilayah-wilayah yang saling melengkapi tetapi dengan fungsi yang berbeda tersebut, pada umumnya berlangsung antara wilayah pusat (*core*) dan wilayah pinggiran (*periphery hinterland*).
3. Wilayah perencanaan (*planning region*), yaitu wilayah-wilayah yang berada dalam kesatuan kebijakan atau administrasi.

2.3.2 Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan per kapita merupakan tolok ukur utama bagi pembangunan suatu daerah. Tolok ukur lainnya seperti struktur politik, kepastian hukum, kelembagaan social, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup berperan untuk menjamin kesinambungan kemajuan dan pemerataan dari waktu ke waktu. Sasaran utama yang banyak dicanangkan oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam mengembangkan wilayahnya adalah meningkatkan pertumbuhan produktivitas (*productivity growth*), pemeratakan

distribusi pendapatan (*income distribution*), memperluas kesempatan berusaha atau menekan tingkat pengangguran (*unemployment rate*), serta menjaga pembangunan agar tetap berjalan secara berkesinambungan (*sustainable development*).

Tidak bisa dipungkiri bahwa perbedaan kecepatan pertumbuhan telah menyebabkan terjadinya kesenjangan kemajuan pembangunan antar wilayah dalam berbagai hal. Di Indonesia, kesenjangan kemajuan pembangunan dapat dilihat antara Jawa dan luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antara perkotaan dan perdesaan.

Pembangunan daerah pada umumnya mencakup berbagai dimensi pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal, kegiatan pembangunan daerah biasanya ditekankan pada pembangunan fisik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian diikuti dengan pembangunan sistem sosial dan politik. Namun demikian, tahapan ini bukanlah merupakan suatu ketentuan yang baku, karena setiap daerah mempunyai potensi pertumbuhan yang berbeda dengan daerah lain.

2.3.3 Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Sumberdaya

Sumberdaya merupakan semua potensi yang dimiliki oleh alam dan manusia, baik dalam bentuk tanah, bahan mentah, modal, tenaga kerja, keahlian, keindahan alam maupun sosial budaya. Potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Karena adanya perbedaan kuantitas dan kualitas sumberdaya tadi, maka di dalam konsep perencanaan pembangunan daerah menurut sumberdaya ini terdapat beberapa pilihan, yaitu :



1. Pembangunan daerah berbasis input, tetapi surplus sumberdaya manusia.

Dalam teori ekonomi klasik, strategi seperti ini dikenal pula dengan istilah *labor surplus strategi*. Bagi daerah yang memiliki sumberdaya manusia sangat banyak, tetapi lahan dan sumberdaya alamnya terbatas, maka *labor surplus strategy* cukup relevan untuk diterapkan. Tujuan utama strategi ini adalah menciptakan lapangan kerja yang bersifat padat karya dan mengupayakan ekspor (pengiriman) tenaga kerja ke daerah lain (antarkota/antarkabupaten, antarprovinsi, atau antarnegara).

2. Pembangunan daerah berbasis input, tetapi surplus sumberdaya alam

Strategi ini mengupayakan berbagai sumberdaya alam yang mengalami surplus bisa diekspor ke daerah lain, baik dalam bentuk bahan mentah maupun bahan setengah jadi. Hasil dari ekspor sumberdaya alam tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengimpor produk yang jumlahnya sangat terbatas di daerah itu, misalnya barang modal, bahan baku, bahan penolong, barang konsumsi atau jasa.

3. Pembangunan daerah berbasis sumberdaya modal dan manajemen.

Sebagian besar daerah di Indonesia, meskipun mempunyai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang cukup banyak, hingga kini masih menghadapi keterbatasan sumberdaya modal dan manajemen (*entrepreneurship*). Karena itu, strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada pengembangan lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) yang kuat dan pengembangan sistem manajemen yang baik dapat ditempuh oleh daerah yang memiliki keterbatasan dalam hal modal dan manajemen tersebut.

4. Pembangunan daerah berbasis seni, budaya, dan keindahan alam.

Di Indonesia, cukup banyak daerah yang memiliki sumberdaya berupa pantai dan panorama yang indah, iklim yang sejuk, cagar alam yang fantastis, seni yang atraktif, serta budaya yang unik. Dengan sumberdaya seperti itu, daerah yang bersangkutan dapat mengembangkan wilayahnya dengan cara mendorong pembangunan transportasi, perhotelan, restoran, kerajinan cinderamata, travel dan usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata.

5. Pembangunan daerah berbasis penataan ruang (lokasi strategis).

Pengembangan wilayah berbasis penataan ruang dapat dilakukan melalui penetapan lokasi-lokasi strategis untuk berbagai kegiatan pembangunan (fisik maupun non fisik). Pemilihan lokasi-lokasi strategis tersebut bisa didasarkan pada basis input (bahan baku dan tenaga kerja), basis transformasi produksi, ataupun basis output (*market/consumer oriented*). Untuk mengembangkan lokasi-lokasi strategis tersebut, ada tiga alternatif yang bisa dipilih : pusat-pusat pertumbuhan (*growth poles*), integrasi fungsional (*functional integration*), dan pendekatan desentralisasi (*decentralization approach*).

2.3.4 Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Komoditas Unggulan

Konsep ini menekankan motor penggerak pembangunan suatu daerah pada komoditas-komoditas yang dinilai bisa menjadi unggulan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Ada beberapa kriteria mengenai komoditas unggulan, diantaranya:

1. Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian. Artinya, komoditas unggulan tersebut dapat

- memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran.
2. Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (*forward and backward linkages*) yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas-komoditas lainnya.
 3. Komoditas unggulan mampu bersaing (*competitiveness*) dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya.
 4. Komoditas unggulan di suatu daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain (*complementary*), baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali).
 5. Komoditas unggulan memiliki status teknologi (*state-of-the-art*) yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.
 6. Komoditas unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal dengan skala produksinya.
 7. Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran (*increasing*), pertumbuhan (*growth*), puncak (*maturity*) hingga penurunan (*decreasing*). Begitu komoditas unggulan yang satu memasuki tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya.
 8. Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.
 9. Pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan, misalnya dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif, dan lain-lain.

10. Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

Apabila komoditas unggulan sudah memasuki fase penurunan, maka pengembangan selanjutnya dapat diteruskan dengan cara:

1. Memperkuat strategi pemasaran agar dapat mempengaruhi konsumen untuk terus mengkonsumsi komoditas tersebut. Cara tersebut dapat dilakukan melalui eksebisi, potongan harga, keringanan pajak, hingga promosi ekspor
2. Meningkatkan kualitas produk agar tetap memiliki daya saing, sehingga permintaan terhadap komoditas tersebut tidak menurun secara drastis.
3. Menciptakan permintaan oleh industri antara (*intermediary industry*) yang berarti sekaligus menciptakan nilai tambah baru bagi perekonomian daerah yang bersangkutan.

2.3.5 Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Efisiensi (*Free Market Mechanism*)

Konsep ini menekankan pembangunan daerah melalui pembangunan bidang ekonomi yang porsinya lebih besar dibandingkan bidang-bidang lainnya. Pembangunan ekonomi itu sendiri dijalankan dalam kerangka pasar bebas atau pasar persaingan sempurna (*free market mechanism*). Secara teoritis, di dalam pasar persaingan sempurna perusahaan/ industri yang efisien tetap kuat dan bertahan, sedangkan perusahaan/industri yang tidak efisien – kecuali *infant industry* dan industri yang mendapat misi khusus – akan kalah bersaing dan kemudian menghilang.

Perencanaan pembangunan daerah yang bertumpu pada prinsip efisiensi merupakan pilihan yang cukup sulit bagi para perencana pembangunan (*planner*) maupun pengambil keputusan (*decision maker*). Tidak jarang sebuah daerah pada awalnya mampu menerapkan prinsip efisiensi, tetapi pada perjalanan selanjutnya terpaksa prinsip tersebut ditinggalkan. Namun demikian, melalui pengkajian yang tepat, perencanaan pembangunan daerah berbasis efisiensi dapat disusun dengan baik. Ada beberapa pedoman yang perlu diperhatikan dalam hal ini, di antaranya:

1. Mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah yang bersangkutan serta visi dan misi pembangunan di wilayah yang lebih luas.
2. Mengacu pada kapabilitas sumberdaya yang dimiliki dan tetap berorientasi pada pelaksanaan misi dan pencapaian visi pembangunan daerah itu.
3. Memperhitungkan secara akurat jangka waktu yang diperlukan untuk pencapaian visi dan misi. Semakin kuat kapabilitas sumberdaya, kian cepat waktu (tahapan) yang dibutuhkan untuk pencapaian visi dan misi
4. Mengacu pada prioritas kebutuhan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

2.3.6 Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Peranan Pelaku Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah dapat pula ditempuh dengan mengedepankan peranan setiap pelaku pembangunan ekonomi. Menurut United Nations (1968), pelaku pembangunan ekonomi dipilah menjadi lima kelompok, yaitu :

1. Usaha kecil/rumah tangga (*household*), seperti petani, nelayan, pedagang, dan usaha kecil/rumah tangga lainnya.

2. Usaha lembaga sosial (*nonprofit institution*), seperti pendidikan, rumah sakit, lembaga keagamaan, dan usaha lembaga sosial lainnya.
3. Lembaga bukan keuangan (*nonfinancial institution*), seperti usaha pertambangan, perkebunan, industri tekstil, semen, mobil, dan berbagai bentuk usaha di sektor riil lainnya.
4. Lembaga keuangan (*financial institution*), seperti bank, asuransi, pegadaian, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya.
5. Pemerintah (*government*), baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melalui BUMN dan BUMD.

Di Indonesia, di samping kelima pelaku pembangunan ekonomi di atas, dapat pula ditambahkan satu lagi pelaku pembangunan ekonomi lainnya yang mempunyai dasar hukum sangat kuat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu koperasi.

Karena di antara para pelaku pembangunan di atas terjadi integrasi satu sama lain, maka kadang kala pembangunan daerah menurut konsep ini menimbulkan dikotomi atau pilihan-pilihan yang sulit. Di Indonesia, misalnya, selama pemerintahan Orde Baru terjadi dikotomi antara konglomerat – baik yang bergerak di bidang keuangan maupun non-keuangan – dan usaha kecil menengah dan koperasi. Ironisnya, kelompok usaha kecil menengah dan koperasi yang jumlahnya sangat banyak justru berada pada posisi yang sangat lemah, sebab pemerintah yang berkuasa pada waktu itu secara politik, hukum, maupun ekonomi lebih mendukung konglomerat yang jumlahnya relatif sedikit. Dengan kata lain integrasi pemerintah-konglomerat jauh lebih dominan dibandingkan integrasi pemerintah-usaha kecil menengah dan koperasi.

Meskipun berbagai konsep perencanaan pembangunan daerah di atas memberikan pilihan strategi yang berbeda-beda, namun kesemuanya memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, konsep-konsep tersebut sama-sama bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antardaerah. Karena itu tidaklah mengherankan jika perpaduan di antara berbagai konsep yang ada telah diterapkan oleh banyak negara selama beberapa dekade terakhir. Akan tetapi, masalah mendasar yang sering terjadi adalah gagalnya konsep-konsep itu menciptakan pembangunan secara merata. Pembangunan telah menjadikan sebagian masyarakat menikmati keuntungan dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, sedangkan sebagian masyarakat lainnya tidak beranjak dari beban kemiskinan. Secara geografis, beberapa daerah telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang maju secara dramatis, sementara beberapa daerah lain masih jauh dari kemampuannya untuk berkembang.

2.4 Analisis Struktur Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi, biasanya diikuti dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi baik struktur permintaan domestik, struktur produksi, serta struktur perdagangannya. Perubahan struktur ini sesungguhnya terjadi akibat adanya interaksi antara dua proses yaitu proses akumulasi (pembentukan modal) dan perubahan konsumsi masyarakat yang terjadi karena meningkatnya pendapatan perkapita. Struktur ekonomi menggambarkan peranan atau sumbangan dari masing-masing sektor dalam pembentukan *Product*

Domestic Regional Brutto (PDRB) yang dalam ruang lingkup sumber-sumber ekonomi di berbagai sektor.

2.5 Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Pada gilirannya, proses tersebut tentunya juga akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat.

Untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi daerah digunakan *PDRB* atas harga konstan. Dengan menggunakan harga konstan, berarti pertumbuhan ekonomi semata-mata hanya dicerminkan oleh pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tertentu, sebab pengaruh pertumbuhan harga telah direduksi.

2.6 Analisis *Shift-Share*

Analisis *Shift-Share* adalah suatu metode yang digunakan untuk mengamati struktur perekonomian daerah dan perubahannya, dengan cara menekankan bagian-bagian pertumbuhan sektor. Yang ditekankan pada metode analisis ini adalah menyakut komponen pergeseran atau perubahannya, dimana total pergeseran (*total shift*) terdiri atas dua sub komponen, yaitu perubahan secara proposional (*propotional shift*) dan perubahan yang berbeda (*differential shift*).

Metode ini mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari metode ini antara lain mudah diaplikasikan karena sederhana, data relatif mudah diperoleh, dapat digunakan untuk analisis yang lebih detail. Misalnya sub sektor dapat memisahkan kontribusi nasional dengan dampak internal tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Sedangkan kelemahan dari metode ini antara lain tidak dapat berfungsi sebagai alat prediksi, tidak memberikan informasi sama sekali mengenai kapasitas daerah tersebut untuk mempertahankan industri yang sedang berkembang atau bagaimana mereka memilih investasi yang berlokasi di daerah tersebut serta merupakan model untuk satu wilayah, bukan untuk antar wilayah.

2.7 Analisis *Location Quotient*

Pendekatan *Location Quotient (LQ)* merupakan suatu teknik untuk memperluas analisa *Shift-Share*. Teknik ini digunakan untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat *self-sufficiency* suatu sektor.

Pada dasarnya pendekatan ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diamati dengan kemampuan sektor yang sama di daerah yang lebih luas/regional/nasional. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk koefisien *LQ* dapat menggunakan satuan jumlah tenaga kerja hasil produksi, nilai tambah atau satuan lainnya yang dapat digunakan sebagai kriteria.

Kemudian untuk menentukan sektor basis dan non-basis adalah dengan melihat sektor yang dominan dalam perekonomian sebagai sektor basis (misalnya sektor pertanian dan industri), dan sisanya sebagai sektor non-basis. Namun untuk

cara yang terakhir ini diperlukan pengetahuan yang mendalam mengenai perekonomian di daerah tersebut.

Secara konseptual tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah disebabkan karena adanya kegiatan produksi masyarakat di wilayah/daerah yang bersangkutan yang dapat dijual (diekspor) ke wilayah/daerah lainnya. Konsep ini dapat dijelaskan melalui konsep basis ekonomi (*economic base*).

Pada dasarnya kegiatan dalam suatu daerah dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu sektor basis dan sektor non-basis. Kegiatan basis (*basic activities*) adalah kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, atau yang memasarkan barang dan jasa-jasa mereka kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sebaliknya kegiatan bukan basis (*non-basic activities*) adalah kegiatan yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bersangkutan, bahkan harus mengimpor dari daerah lain. Dengan demikian pertumbuhan sektor-sektor (basis dan non-basis) ini sangat dipengaruhi oleh pembangunan daerah secara keseluruhan.

2.8 *Economic Base Model (Analisis Multiplier)*

Multiplier merupakan ratio dari perubahan input/pendapatan dalam keseimbangan akibat dari perubahan output yang lebih besar dari pada perubahan variabel bebas. Peningkatan dari suatu produk dapat menyebabkan produksi dari produk tersebut meningkat. Keadaan ini mengakibatkan timbulnya permintaan baru terhadap produk dari industri lain sebagai penyedia bahan baku dari produk tersebut. Demikian juga peningkatan output pada industri penyedia bahan baku

akan menimbulkan permintaan lain terhadap perusahaan/industri yang terkait, demikian seterusnya. Dampak peningkatan produksi dari satu kegiatan usaha tertentu dapat menyebabkan peningkatan output secara keseluruhan yang lebih besar dari peningkatan semula. Proses ini disebut sebagai proses multiplier, pendekatan ini menggunakan Model Basis Ekspor.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi perekonomian regional di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sektor-sektor unggulan regional di Indonesia yang diharapkan akan memberi peluang bagi percepatan pertumbuhan perekonomian daerah

3.2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat menjadi :

1. Suatu kajian ilmiah tentang penentuan sektor-sektor unggulan regional di Indonesia dan sekaligus sebagai referensi bagi peneliti yang tertarik dalam ekonomi regional.
2. Suatu bahan masukan bagi kebijakan pembangunan regional di Indonesia

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Analisis Struktur Ekonomi, Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Analisis *Location Quotient*, Analisis *Shift-Share*, dan Analisis *Multiplier*. Berikut adalah formulasi masing-masing alat dan model analisis yang digunakan.

4.1.1. Analisis Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menggambarkan peranan atau sumbangan dari masing-masing sektor dalam pembentukan *Product Domestic Regional Brutto (PDRB)* yang dalam ruang lingkup lebih jauh akan memperlihatkan bagaimana suatu perekonomian mengalokasikan sumber-sumber ekonomi di berbagai sektor.

Untuk melihat pergeseran struktur perekonomian dalam *PDRB* digunakan persamaan sebagai berikut:

$$S_{nt} = X_{nt} / PDRB_t \times 100\% \dots\dots\dots (7)$$

dimana :

S_{nt} = *Share* / kontribusi sektor tertentu pada tahun t

X_{nt} = Nilai sektor tertentu pada tahun t

$PDRB_t$ = Nilai *PDRB* tahun t

4.1.2. Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun digambarkan melalui penyajian *PDRB* atas harga konstan secara berkala. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya peranan masing-masing sektor dalam pembentukan *PDRB*, tetapi juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan masing-masing sektor yang mempunyai cukup besar.

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi digunakan persamaan sebagai berikut

:

$$PDRB_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots (8)$$

dimana :

$PDRB_t$ = Laju pertumbuhan ekonomi

$PDRB_t$ = *PDRB* pada tahun t

$PDRB_{t-1}$ = *PDRB* pada tahun t-1

4.1.3. Analisis *Location Quotient (LQ)*

Analisis ini merupakan suatu peralatan analisis untuk mengetahui sektor-sektor basis atau sektor yang menghasilkan *monetary inflow* lebih besar bagi daerah. Formulasi *LQ* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{NTB_i^r / NTB_i^n}{PDRB^r / PDRB^n} \dots\dots\dots (9)$$

dimana :

LQ_i = Indeks *LQ* sektor i di region r

NTB_i^r = Nilai tambah bruto sektor i di region r

NTB_i^n = Nilai tambah bruto sektor i di nasional

- PDRB'** = Produk Domestik Regional Bruto di region r
PDB^a = Produk Domestik Bruto

Dengan persamaan ini dapat diketahui apakah sektor ini merupakan sektor basis atau non-basis, yakni jika :

- LQ > 1** = berarti sektor tersebut merupakan sektor basis
LQ < 1 = berarti sektor tersebut merupakan sektor non-basis
LQ = 1 = berarti sektor tersebut merupakan sektor swasembada

4.1.4. Analisis Shift-Share

Analisis ini menggunakan indikator-indikator yang mengukur perkembangan relatif dari suatu variabel tertentu di provinsi dengan gambaran nasional. Dengan kata lain, analisis *shift-Share* merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Formulasi *Shift-Share* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$G=R+S \dots\dots\dots (10)$$

dimana :

- G** = Pertumbuhan Regional
R = Regional Share
S = Shift

Persamaan tersebut dapat ditulis menjadi :

$$S = G - R \dots\dots\dots (11)$$

Diketahui:

$$G_t = [X_{rt} - X_{ro}] \dots\dots\dots (12)$$

$$R_t^i = [X_{nt}/X_{no} - 1] * X_{ro}^i \dots\dots\dots (13)$$

dengan :

$$\text{Differential Shift (Sd)} : \text{Sd}_t^i = [X_{rt}^i - (X_{nt}^i/X_{no}^i)X_{ro}^i] \dots\dots\dots(14)$$

$$\text{Proportional Shift} : \text{Sp}_t^i = [X_{nt}^i/X_{no}^i - X_{nt}/X_{no}] * X_{ro}^i \dots\dots\dots(15)$$

dimana :

X_r = PDRB Provinsi

X_r^i = Sektor i dalam PDRB

X_n = PDB Nasional

X_n^i = Sektor i dalam PDB

4.1.5. Economic Base Model (Analisis Multiplier)

Multiplier dari sektor basis digunakan untuk melihat seberapa besar pertumbuhan dari sektor-sektor yang merupakan sektor basis apabila dilakukan investasi atau prioritas pengeluaran pemerintah atas sektor basis tersebut. Analisis ini juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk melihat penggandaan yang diperoleh akibat adanya pengeluaran yang dilakukan oleh sektor tertentu. Formulasi yang digunakan untuk menghitung multipliernya adalah sebagai berikut:

$$T = B + NB \dots\dots\dots (16)$$

$$NB = aT \dots\dots\dots (17)$$

dimana :

T = Total Kegiatan

B = Sektor Basis

NB = Sektor Non-basis

a = Persentase Bagian dari Non-basis (MPC Lokal)

Dengan demikian, bila persamaan (17) disubstitusikan ke dalam persamaan (16) maka didapatkan :

$$T = B + aT$$

$$T - aT = B$$

$$T(1-a) = B$$

$$T = 1/(1-a) B \dots\dots\dots (18)$$

$1/(1-a)$ disebut dengan *multiplier*.

4.2. Identifikasi Variabel

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : dalam analisis struktur ekonomi dimana S_{nt} merupakan share/kontribusi sektor tertentu pada tahun t , X_{nt} merupakan nilai sektor tertentu pada tahun t , $PDRB_t$ merupakan nilai PDRB tahun t . Dalam analisis pertumbuhan ekonomi dimana $PDRB_x$ merupakan laju pertumbuhan ekonomi, $PDRB_t$ merupakan PDRB pada tahun t dan $PDRB_{i-1}$ merupakan PDRB pada tahun $i-1$.

Dalam Analisis *Location Quotient (LQ)*, dimana LQ_i merupakan indeks LQ sektor i di region r , NTB_{ri} merupakan nilai tambah bruto sektor i di region r , NTB_{ni} merupakan nilai tambah bruto sektor i di nasional, $PDRB_r$ merupakan Produk Domestik Regional Bruto di region r , dan PDB_n merupakan Produk Domestik Bruto

Sementara dalam Analisis *Shift-Share* dimana X_r merupakan PDRB provinsi, X_r^i merupakan sektor i dalam PDRB, $X_n = PDB$ Nasional, dan $X_{in} =$ Sektor i dalam PDB. Dalam Analisis Multiplier dimana T merupakan Total Kegiatan, B merupakan Sektor Basis, NB merupakan Sektor Non-basis, a merupakan Persentase Bagian dari Non-basis (MPC Lokal)

4.3. Definisi Operasional

Pengertian nilai sektor tertentu pada tahun t (X_{nt}) merupakan nilai akhir yang dihasilkan suatu sektor dalam satuan rupiah dalam kurun waktu tertentu, PDRB $_t$ merupakan nilai akhir produk dari semua sektor di daerah tertentu (provinsi) dalam satu tahun tertentu. Dalam LQ_i , NTB $_i$ merupakan nilai tambah bruto yang dihasilkan sektor i di region r , NTB $_n$ merupakan nilai tambah bruto sektor i di nasional, PDRB $_r$ merupakan Produk Domestik Regional Bruto di region r , dan PDB $_n$ merupakan Produk Domestik Bruto

Sementara dalam Analisis Shift-Share dimana X_r merupakan PDRB provinsi, X^i_r merupakan sektor i dalam PDRB, $X_n = PDB$ Nasional, dan $X_{in} =$ Sektor i dalam PDB. Dalam Analisis Multiplier dimana Total Kegiatan (T) adalah semua aktivitas ekonomi daerah, Sektor Basis (B) adalah sektor yang berorientasi ekspor baik ke luar negeri maupun ke luar daerah, Sektor Non-basis (NB) adalah sektor yang tidak berorientasi ekspor.

4.4. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder untuk 30 provinsi di Indonesia yaitu Dista Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, *Kep. Bangka Belitung*, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, *Banten*, Jawa Tengah, Dista Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, *Gorontalo*, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Maluku, *Maluku Utara*, Papua. Adapun data yang diperlukan adalah PDRB tahun konstan 1993 untuk 30 provinsi dan PDB Indonesia

tahun konstan 1993 dari tahun 1995 sampai tahun 2000. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk data untuk provinsi pemekaran adalah dari Badan Pusat Statistik.

4.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dari beberapa literatur sehingga hasil penelitian ini dapat diperoleh kajian yang handal dan akurat

4.6. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan model deterministik sehingga perangkat pengolahan data hanya digunakan Program Excel.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji 30 Provinsi di Indonesia dari tahun 1995 sampai tahun 2000, sehingga untuk mempermudah analisis digunakan lingkup pulau yaitu Sumatera; Jawa dan Bali; Kalimantan; Sulawesi; serta yang terakhir Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.

5.1. Sumatera

Berdasarkan kontribusi sektoral ternyata tiga sektor yang memiliki kontribusi tertinggi pembentukan PDRB provinsi di Pulau Sumatera adalah sektor industri pengolahan, sektor pertambangan & penggalian, serta sektor pertanian. Sektor industri pengolahan memiliki rata-rata kontribusi di atas 15 % kecuali untuk Provinsi Bengkulu dan Lampung. Sektor pertambangan & penggalian tertinggi adalah Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung yang rata-rata di atas 25%. Kemudian sektor pertanian di hampir provinsi memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap pembentukan PDRB, kecuali Provinsi Riau yang hanya sekitar 7%. Selain itu di beberapa provinsi terlihat kontribusi yang nyata untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kondisi ini menggambarkan bahwa Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera masih mengandalkan kegiatan sektor primer dalam pembentukan PDRB, meskipun kontribusi sektor sekunder cukup nyata juga.

Kemudian berdasarkan pertumbuhan sektoral ternyata satu sektor yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan tertinggi selama periode 1995-2000 adalah

sektor listrik, gas dan air minum yang memiliki rata-rata pertumbuhan per tahun di atas 10%, kecuali Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan dan Bengkulu dan pada saat pertumbuhan sektor yang lain adalah negatif. Secara khusus pada tahun 1995 – 1997 (sebelum krisis) selain sektor listrik, gas dan air minum yang memiliki pertumbuhan yang tinggi maka sektor bangunan cukup berperan juga. Pada tahun 1998 – 2000 (saat krisis) adalah hampir semua sektor mengalami pertumbuhan yang negatif, kecuali sektor listrik, gas dan air minum. Kondisi ini menjelaskan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia memberikan dampak pada penurunan pertumbuhan (bahkan negatif) pada semua sektor dalam perekonomian di daerah.

Berdasarkan Analisis *Location Quotient (LQ)* ternyata Provinsi Jambi, Kep. Bangka Belitung dan Bengkulu semua sektor memiliki nilai LQ dibawah 1. Artinya provinsi ini belum mampu untuk mengeksport pada semua sektornya pada daerah lain, bahkan masih melakukan impor dalam memenuhi kebutuhan per sektornya. Dalam analisis gabungan LQ dan *Shift-Share* dengan perbandingan nasional ternyata hampir semua provinsi untuk sektor pertanian merupakan sektor basis dan memiliki Sd dan Sp positif, kecuali Provinsi Jambi, Kep. Bangka Belitung dan Bengkulu. Kondisi ini menggambarkan bahwa sektor pertanian di beberapa Provinsi tersebut pertumbuhannya melebihi pertumbuhan sektor pertanian nasional. Sementara Provinsi Jambi, Kep. Bangka Belitung dan Bengkulu tidak memiliki sektor basis yang berarti pertumbuhannya di bawah pertumbuhan sektoral nasional.

Dari sisi *multiplier* terlihat bahwa semua provinsi mempunyai nilai rata-rata antara 1 dan 2, kecuali Provinsi Sumatra Barat dan Lampung yang memiliki

multiplier di atas 2. Kondisi ini menjelaskan bahwa sektor basis provinsi-provinsi di Pulau Sumatera masih kecil memberikan *spread effect* dalam perekonomian.

Provinsi Jambi, Kep. Bangka Belitung, dan Bengkulu mempunyai perkembangan ekonomi yang lambat. Kondisi ini terjadi karena polarisasi pembangunan di Sumatera terpusat pada kota-kota besar di sepanjang koridor Sumatera bagian timur, yaitu Medan sampai Palembang.

Peranan sektor pertanian yang cukup besar di Sumatera, secara khusus dapat dilihat misalnya peranan komoditi karet dan kelapa sawit di Sumatera Utara. Dengan adanya komoditas unggulan ini maka perencanaan pembangunan daerah hendaknya berbasis pada komoditas unggulan. Konsep ini juga menekankan motor penggerak pembangunan suatu daerah pada komoditas-komoditas yang dinilai bisa menjadi unggulan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Karena komoditas unggulan mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian. Artinya, komoditas unggulan tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran. Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (*forward and backward linkages*) yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas-komoditas lainnya. Demikian juga untuk Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang mempunyai komoditas unggulan minyak bumi dan gas alam.

Sumatera Barat mempunyai keunggulan pada seni, budaya dan keindahan alam. Perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada pembangunan berbasis seni, budaya dan keindahan alam, sehingga pengembangan wilayahnya dilakukan dengan cara mendorong pembangunan transportasi, perhotelan, restoran, kerajinan

cinderamata, travel dan usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata. Provinsi Sumatera Barat mempunyai kawasan unggulan yaitu Kawasan Andalan Pasaman.

Sementara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sumatera telah dibentuk pusat-pusat pertumbuhan, seperti :

- a. Kawasan potensial tumbuh seperti IMT-GT (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle) yang dibentuk pada tahun 1993, dimana Indonesia meliputi kawasan industri Lhokseumawe, kawasan Medan, Binjai dan Deliserdang. Malaysia meliputi Kedah, Perak, Penang dan Perlis. Thailand meliputi Satun, Songkhla, Yala, Narathiwat dan Pattani. IMT-GT dengan fokus kerjasama bidang perdagangan, investasi, mobilitas tenaga kerja, pertanian, perikanan, agroindustri, energi dan promosi pariwisata.
- b. Pusat pertumbuhan SIJORI (Singapura – Johor – Riau) yang dibentuk tahun 1989 dengan fokus kerjasama industri, pariwisata, tenaga kerja dan investasi. Pusat pertumbuhan ini untuk mengembangkan Provinsi Riau dan sekitarnya.
- c. Program industrialisasi daerah perbatasan (*Border Industrialization Programme*) yaitu kerjasama antara Indonesia dan Singapura di Pulau Batam
- d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Natuna – Riau

5.2. Jawa dan Bali

Berdasarkan kontribusi sektoral ternyata dua sektor yang memiliki kontribusi tertinggi pembentukan PDRB provinsi di Pulau Jawa dan Bali adalah sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel & restoran, kecuali Provinsi Bali dengan sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel & restoran yang

terbesar. Ketiga sektor tersebut memiliki rata-rata kontribusi di atas 20% terhadap pembentukan PDRB. Kondisi ini menggambarkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali sudah terjadi *proses transformasi ekonomi* dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier.

Kemudian berdasarkan pertumbuhan sektoral ternyata sektor yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan tertinggi selama periode 1995-2000 adalah sektor listrik, gas dan air minum yang memiliki rata-rata pertumbuhan per tahun di atas 10%. Pada saat yang sama pertumbuhan sektor yang lain adalah negatif. Sementara pada tahun 1995 – 1997 (sebelum krisis) pertumbuhan sektoral yang tertinggi adalah sektor bangunan dan sektor bank & lembaga keuangan yang rata-rata di atas 10%, sementara pada tahun 1998 – 2000 (saat krisis) hanya sektor listrik, gas dan air minum yang tetap mengalami pertumbuhan positif, sedangkan beberapa sektor lain negatif, bahkan untuk sektor bangunan dan sektor bank & lembaga keuangan mengalami pertumbuhan negatif yang cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada saat krisis ternyata sektor bangunan dan sektor bank & lembaga keuangan adalah sektor yang langsung terpuak. Seperti diketahui bahwa pada saat krisis hampir semua perbankan nasional *collapse* (kantor pusat di pulau Jawa), sehingga perlu program rekapitalisasi perbankan dan *collapse*-nya sektor perbankan membawa dampak pada *collapse*-nya sektor properti (mayoritas di pulau Jawa) yang memang tumbuh dari kredit perbankan.

Berdasarkan Analisis LQ diketahui bahwa semua sektor pada hampir semua Provinsi adalah sektor basis, kecuali Provinsi Yogyakarta, sehingga dapat dikatakan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali adalah pengekspor. Dalam analisis gabungan LQ dan *Shift-Share* dengan perbandingan nasional

ternyata sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor basis dan memiliki Sd dan Sp positif, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian (untuk Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur), dan sektor industri pengolahan pada posisi selanjutnya pada Provinsi yang berbeda. Sementara Provinsi Yogyakarta hanya memiliki 1 sektor basis yaitu jasa-jasa. Dari sisi multiplier terlihat bahwa semua Provinsi mempunyai nilai rata-rata 1, kecuali Provinsi Yogyakarta memiliki multiplier di atas 4.

Pulau Jawa memiliki polarisasi pembangunan terpusat pada kota-kota besar di sepanjang koridor Jawa belahan utara yaitu Jakarta–Bandung–Semarang–Surabaya, yang didukung oleh kawasan cepat tumbuh seperti :

- a. Jabodetabek, meliputi Jakarta–Bogor–Depok–Tangerang–Bekasi.
- b. Kawasan industri Cilegon di Banten, Pulogadung di Jakarta, Jababeka di Cikarang (Bekasi).
- c. Gerbangkertasusila, meliputi Gresik – Bangkalan – Kertosono – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan
- d. Kawasan industri SIER di Surabaya, dan PIER di Pasuruan

Sementara itu, Bali diarahkan pada pembangunan daerah berbasis seni, budaya dan keindahan alam, sehingga pengembangan wilayahnya dilakukan dengan cara mendorong pembangunan transportasi, perhotelan, restoran, kerajinan cinderamata, travel dan usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, pariwisata dan seni di Bali menggunakan perencanaan pembangunan daerah berbasis komoditas unggulan. Konsep ini menekankan motor penggerak pembangunan suatu daerah pada komoditas-komoditas yang dinilai bisa menjadi unggulan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Komoditas

unggulan mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian, artinya dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran. Disamping itu, komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (*forward and backward linkages*) yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas-komoditas lainnya.

5.3. Kalimantan

Berdasarkan kontribusi sektoral ternyata dua sektor yang memiliki kontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB provinsi di Pulau Kalimantan adalah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Khusus Provinsi Kalimantan Timur, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah pertambangan & penggalian, dan sektor industri pengolahan. Ketiga sektor tersebut memiliki rata-rata kontribusi di atas 20,00% terhadap pembentukan PDRB. Kondisi ini menggambarkan bahwa sektor pertambangan & penggalian menjadi andalan dan didukung sektor industri pengolahan yang terkait dengan sektor pertambangan & penggalian.

Kemudian berdasarkan pertumbuhan sektoral ternyata sektor yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan tertinggi selama periode 1995-2000 adalah sektor pertambangan & penggalian, sementara sektor listrik, gas dan air minum berada posisi selanjutnya. Rata-rata pertumbuhan sektor pertambangan & penggalian per tahun di atas 15% dan sektor listrik, gas dan air minum di atas 10%, pada saat pertumbuhan sektor yang lain adalah negatif. Pada tahun 1995 – 1997 (sebelum krisis) dan tahun 1998 – 2000 (saat krisis) sektor pertambangan & penggalian, dan sektor listrik, gas dan air minum tumbuh cukup tinggi, sedangkan beberapa sektor

lain adalah negatif. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pada saat krisis, dimana Rupiah terdepresiasi sangat tinggi terhadap US Dollar, maka sektor pertambangan yang berorientasi ekspor mengalami *booming*.

Berdasarkan Analisis LQ diketahui bahwa hampir semua provinsi memiliki nilai LQ untuk semua sektor kurang dari 1, kecuali Kalimantan Timur dengan sektor pertambangan & penggalian dengan nilai LQ di atas 5 dan sektor industri pengolahan dengan nilai di atas 2. Dalam analisis gabungan LQ dan *Shift-Share* dengan perbandingan nasional ternyata hampir semua Provinsi di Kalimantan tidak *memiliki* sektor basis, kecuali Kalimantan Timur. Untuk Provinsi Kalimantan Timur, sektor pertambangan & penggalian serta sektor industri pengolahan merupakan sektor basis dan memiliki Sd dan Sp positif. Dari sisi *multiplier*, Provinsi Kalimantan Timur memiliki multiplier di atas 1.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, maka telah dikembangkan kawasan pertumbuhan, seperti :

- a. Segitiga pertumbuhan BIMP-EAGA (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippine East ASEAN Growth Area), yang dibentuk pada tahun 1994 dengan cakupan wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sabah, Labuan, Serawak, Brunei Darussalam, Mindanao, Palawan. Fokus kerjasama di bidang energi, kelautan, agroindustri, mobilitas manusia, telekomunikasi, SDM, konstruksi dan bahan konstruksi, kapital, pariwisata serta manajemen lingkungan. Hadirnya segitiga pertumbuhan juga diharapkan bisa mempercepat pembangunan Kawasan Timur Indonesia, khususnya provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- b. Kawasan Andalan Tatapan Buma di Kalimantan Timur.

5.4. Sulawesi

Berdasarkan kontribusi sektoral ternyata dua sektor yang memiliki kontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB provinsi di Pulau Sulawesi adalah sektor pertanian dan sektor pengangkutan & komunikasi. Khusus Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, sektor perdagangan, hotel dan restoran juga memberikan kontribusi terbesar. Kondisi ini terkait dengan kedua Provinsi tersebut yang mempunyai kegiatan pariwisata yang berkembang. Ketiga sektor tersebut memiliki rata-rata kontribusi di atas 20% terhadap pembentukan PDRB.

Kemudian berdasarkan pertumbuhan sektoral ternyata sektor yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan tertinggi selama periode 1995-2000 adalah sektor listrik, gas dan air minum yang memiliki rata-rata pertumbuhan per tahun di atas 20% serta sektor pertanian di atas 15%, pada saat pertumbuhan sektor yang lain adalah negatif. Sementara pada tahun 1998 - 2000 (saat krisis), sektor perdagangan, hotel dan restoran di Sulawesi Utara dan Gorontalo mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada saat krisis ternyata sektor ini mengalami *booming*.

Berdasarkan Analisis LQ ternyata bahwa semua provinsi di Sulawesi memiliki nilai LQ di bawah 1, kecuali Provinsi Sulawesi Selatan untuk sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Analisis gabungan LQ dan *Shift-Share* dengan perbandingan nasional ternyata hampir semua provinsi di Sulawesi tidak memiliki sektor basis, kecuali Provinsi Sulawesi Selatan pada sektor pertanian dan memiliki Sd dan Sp positif. Dari sisi *multiplier*, Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki multiplier di atas 2.

Peranan yang cukup tinggi sektor pertanian di Sulawesi, khususnya cengkeh di Sulawesi Utara hendaknya dapat dipergunakan sebagai perencanaan pembangunan daerah berbasis komoditas unggulan. Konsep ini menekankan motor penggerak pembangunan suatu daerah pada komoditas-komoditas yang dinilai bisa menjadi unggulan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Komoditas unggulan mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian, artinya komoditas unggulan tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran. Disamping itu, komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (*forward and backward linkages*) yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas-komoditas lainnya. Pulau Sulawesi mempunyai kawasan pertumbuhan cepat yang dikenal dengan Kawasan Andalan Tolitoli di Sulawesi Tengah.

5.5. Maluku, Papua dan Nusa Tenggara

Berdasarkan kontribusi sektoral untuk dua sektor yang memiliki kontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB provinsi di Maluku, Papua dan Nusa Tenggara adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel & restoran. Sementara untuk Papua, kontribusi terbesar adalah dari sektor pertambangan dan penggalian yang lebih dari 50%. Kondisi ini tidak terlepas keberadaan *Freeport* yang mempunyai peranan besar dalam sektor tersebut. Sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, & restoran untuk di Maluku, Papua dan Nusa Tenggara tersebut memiliki rata-rata kontribusi di atas 20% terhadap pembentukan PDRB. Selain itu, di beberapa Provinsi terlihat kontribusi nyata untuk sektor jasa-jasa.

Kemudian berdasarkan pertumbuhan sektoral, ternyata sektor yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan tertinggi selama periode 1995-2000 adalah sektor listrik, gas dan air minum dengan rata-rata pertumbuhan per tahun di atas 10%. Ini terjadi pada saat pertumbuhan sektor-sektor yang lain negatif, kecuali Provinsi Papua untuk sektor pertambangan dan penggalian yang tetap tumbuh dengan rata-rata di atas 20%. Sementara pertumbuhan sektor listrik, gas dan air minum pada tahun 1995 – 1997 (sebelum krisis) dan tahun 1998 – 2000 (saat krisis) di atas 20% sedangkan beberapa sektor lain adalah negatif.

Berdasarkan Analisis LQ diketahui bahwa semua provinsi memiliki nilai di bawah 1, kecuali untuk Papua dengan sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki nilai di atas 3. Analisis gabungan LQ dan *Shift-Share* dengan perbandingan nasional ternyata semua provinsi tidak memiliki sektor basis, kecuali Papua dengan sektor pertambangan dan penggalian dan memiliki Sd dan Sp positif. Dari sisi *multiplier*, Provinsi Papua memiliki multiplier di atas 1.

Papua memiliki sumberdaya alam yang melimpah tetapi kualitas sumberdaya manusia terbatas, sehingga strategi yang diupayakan adalah pembangunan daerah berbasis input, tetapi surplus sumberdaya alam. Dengan strategi ini diupayakan berbagai sumberdaya alam yang mengalami surplus bisa diekspor ke daerah lain, baik dalam bentuk mentah maupun bahan setengah jadi. Hasil dari ekspor sumberdaya alam tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengimpor produk yang jumlahnya sangat terbatas di daerah itu, misalnya barang modal, bahan baku, bahan penolong, barang konsumsi atau jasa. Selanjutnya, untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi telah dibentuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Biak.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat dikatakan bahwa pembangunan regional provinsi-provinsi di luar Jawa dan Bali masih mengandalkan peranan sektor primer (pertanian, dan pertambangan & penggalian) dan memiliki sektor basis yang kecil. Implikasinya bahwa perkembangan sektoral di provinsi-provinsi tersebut masih mengimpor dari provinsi-provinsi di Jawa dan Bali. Kondisi ini akan berakibat pada lemahnya daya dukung dalam perkembangan ekonomi daerah dan kecilnya penyerapan tenaga kerja sektoral. Namun demikian, pada saat krisis (depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar), maka sektor-sektor primer menjadi idola. Produk yang dihasilkan dari sektor-sektor tersebut yang sebagian besar berorientasi ekspor menikmati *booming*.

6.2. Saran

Dengan penentuan sektor unggulan melalui Analisis Struktur Ekonomi, Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Analisis *Location Quotient*, Analisis *Shift-Share* Dan Analisis *Multiplier* maka diharapkan dapat diperoleh acuan yang jelas dalam perencanaan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, Nuzul., *Lecture Note : Ekonomi Regional*, Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Aghion, P. and Howitt, P., *Capital Accumulation and Innovation as Complementary Factors in Long-run Growth*, Mimeo, Ohio State University, Columbus, 1997.
- Ambardi, Urbanus M dan Socia Prihawantoro (ed)., *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah : Kajian Konsep dan Pengembangan*, BPPT, Jakarta, 2002.
- Barro, Robert .J. and Xavier Sala-i-Martin., *Economic Growth*, Mc Graw-Hill Inc., New York, 1995.
- BPS, *PDB Nasional*, Berbagai Penerbitan, Publikasi BPS.
- BPS, *PDRB Provinsi di Indonesia*, Berbagai Penerbitan, Publikasi BPS.
- Mankiw, N.G., Romer, D., and Weil, D.N., *Contribution to The Empirics of Economic Growth*, Quarterly Journal of Economics, 107, 407-38, 1992
- Marrewijk, Charles van., *Capital Accumulation, Learning, and Endogenous Growth*. Oxford Economic Papers 51, Oxford University Press. UK, 1999.
- Ray, Debraj, *Development Economics*, Princeton University Press, Princeton-New Jersey, 1997
- Richardson, HW, *Regional Economics*, University of Illinois Press, Urbana Chicago, 1978.
- Romer, David, *Advanced Macroeconomics, second edition*, McGraw-Hill, Singapore, 2001.
- Sidik, Machfud (ed), *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, LPEM dan MPKP FE-UI, Kompas, Jakarta, 2002
- Susanti, Hera, Moh. Ikhsan, Widyanti, *Indikator-Indikator Makroekonomi, Edisi kedua*, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta 2000
- Tarmidi, Lepi T., *Lecture Note : Ekonomi Pembangunan I*, Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001
- Tarmidi, Lepi T, *Ekonomi Pembangunan*, PAU-EK-UI, Jakarta, 1992.

